

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Arik Wijaya Kusuma
arikwijayakusuma@gmail.com
Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of transparency of village fund allocation management, accountability of village fund allocation management, village policy, and village institutional on public wealth. The research location was at Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Moreover, the instrument used questionnaires that were distributed to the respondents who were in the Local government of Desa Bulurejo. The research was quantitative. The population was villagers of Desa Bulurejo in 2022. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling. In line with that, there were 96 samples with different ages, educational backgrounds, and jobs. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 26. The result concluded that transparency of village fund allocation management had a negative and significant effect on public wealth. However, accountability of village fund allocation management had a positive and significant effect on public wealth. Likewise, village policy had a positive and significant effect on public wealth. Similarly, village institutional had a positive and significant effect on public health.

Keywords: transparency, accountability, village institutional, public wealt

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi pengelolaan alokasi dana desa, akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang berada di lingkungan Pemerintahan Desa Bulurejo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi penelitian masyarakat Desa Bulurejo pada tahun 2022. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan kriteria - kriteria yang sudah ditentukan. Berdasarkan metode tersebut diperoleh jumlah responden sebanyak 96 orang dengan usia dan latar belakang pendidikan serta pekerjaan yang berbeda. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS 26 (*Statistical Product and Service Solutions*). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, kebijakan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan kelembagaan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: transparansi, akuntabilitas, kebijakan desa, kelembagaan desa, kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Desa menjadi garis paling depan untuk dapat mensukseskan program yang dijalankan oleh pemerintah. Karena pada saat ini pemerintah Indonesia masih berusaha dalam melaksanakan pembangunan desa dan menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dapat didefinisikan bahwa desa adalah satu kesatuan masyarakat yang tinggal dalam suatu batasan wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, dengan

memprioritaskan kepentingan masyarakat didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul (sejarah), hak lama (tradisional) yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Adanya undang-undang tersebut, diharapkan dapat membuat pemerintah desa dalam mengatur desanya secara independen, kompeten, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mengupayakan peningkatan pelayanan publik dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi di masyarakat guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan jangkauan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah pusat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan sejumlah dana dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Melihat total ADD yang diberikan kepada desa cukup besar, akan memunculkan suatu teka-teki apakah aparat desa sanggup mengelola anggaran tersebut dengan maksimal. Hal tersebut mengingatkan bahwa yang dulunya desa melakukan pembangunan dengan bantuan dana yang sedikit dan pengelolaannya yang masih berorientasi pada pusat, dan setelah kebijakan ADD dijalankan, tiap-tiap desa diberikan anggaran yang memadai dan diolah secara mandiri untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Kholmi, 2016).

Alangkah baiknya, untuk menghindari timbulnya kecurangan dan menjawab keraguan dari masyarakat dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), transparansi dan akuntabilitas publik dalam berbagai kegiatan oleh kinerja aparat desa dalam mengelola anggaran dana menjadi tuntutan yang harus dilakukan. Transparansi adalah keterbukaan informasi sebuah organisasi yang dapat diakses semua orang (masyarakat) dengan mudah mengenai keterangan kinerja pemerintah yang perlu disampaikan. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban, dimana sebuah kewajiban dari perbuatan perorangan atau badan hukum sebuah organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang selama ini sudah dilakukan terhadap pihak yang mempunyai kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban.

Selain transparansi dan akuntabilitas yang dibutuhkan dalam menjawab keraguan masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa, implementasi kebijakan desa yang sudah ditetapkan juga diperlukan. Kebijakan desa dibuat untuk mengatur semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal pada desa tersebut tanpa terkecuali. Tentu penerapan kebijakan desa tidak akan berhasil tanpa dukungan positif dari masyarakatnya. Untuk itu, kelembagaan desa yang ada pada desa tersebut menjadi faktor yang berpengaruh atas kesuksesan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sandhi (2015) menyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan wadah masyarakat untuk terlibat dan menyalurkan harapan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan desa dimana masyarakat sebagai tumpuannya. Melalui peningkatan layanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, serta pengembangan kegiatan yang sesuai kebutuhan masyarakat adalah tujuan terbentuknya kelembagaan desa guna mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat melibatkan banyak pihak diantaranya masyarakat dan aparat desa serta pemerintah pusat. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah maupun pemerintah desa yakni kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana desa yang disebabkan oleh minimnya kontrol dari pemerintah pusat dan minimnya SDM (masyarakat) yang peduli. Oleh sebab itu, perlu ditelusuri lebih jauh seberapa transparan dan akuntabilitas serta peran kebijakan dan kelembagaan desa atas pengelolaan anggaran alokasi dana desa untuk mewujudkan program kesejahteraan masyarakat yang sudah direncanakan.

TINJAUAN TEORITIS

Stewardship Theory

Donaldson dan Davis (1989) *Stewardship Theory* merupakan penggambaran keadaan sasaran utama manajer adalah kepentingan organisasi, bukan termotivasi dengan arahan individu. Karena pada dasarnya teori ini beranggapan bahwa jika pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan organisasi lebih besar, maka tujuan individualnya juga akan terpenuhi. *Stewardship Theory* adalah teori yang digunakan untuk mendasari penelitian ini, karena dalam teori ini beranggapan bahwa manajer dibiarkan bergerak sendiri sebagai pemberi layanan yang bertanggungjawab dalam mengendalikan aset yang dimiliki. Dalam konsep teori ini *steward* akan berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya, itu sebabnya perilaku *steward* harus bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan organisasinya (Sugista, 2017). Tujuan organisasi yang dimaksudkan adalah mengenai tujuan kesejahteraan masyarakatnya, karena kesejahteraan masyarakat adalah target yang harus terpenuhi dalam mendukung program pemerintahan desa.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang diberikan secara proporsional yang diperoleh dari hasil pajak daerah dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana perimbangan yang diperoleh setiap desa merupakan hasil pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan persentase paling sedikit 10%. Dana desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan yang diberikan untuk desa dan disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota untuk pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.

Transparansi

Salah satu aspek yang menjadi dasar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dengan transparansi. Renyowijoyo (2013:13) menyebutkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan sebuah informasi atas kegiatan dalam menggunakan sumber daya publik pada masyarakat. Masyarakat memiliki hak yang setara untuk mengetahui prosedur anggaran sebagai wujud transparansi, lantaran mencakup aspirasi dan kepentingannya. Masyarakat berhak dalam mengetahui transparansi supaya masyarakat juga dapat memberikan pengawasan atas kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Pemberian informasi kepada masyarakat tentu juga akan mengurangi keraguan masyarakat terhadap pemerintah desanya.

Akuntabilitas

Menurut Renyowijoyo (2013:14) akuntabilitas adalah kewajiban dengan memberikan pertanggungjawaban berdasarkan kinerja sebuah organisasi atau pimpinan kepada bagian yang memerlukannya dengan bentuk atau wujud laporan yang bisa dipertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan dengan menerapkan prinsip perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah tanggungjawab yang harus dilakukan oleh pemerintah desa selaku pihak yang diberi wewenang dalam mengatur keuangan kepada masyarakat desa selaku objek yang berhak mengetahui perkembangan kinerja pemerintah desanya.

Kebijakan Desa

Kebijakan desa dapat diartikan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan batasan-batasan yang dilakukan semua masyarakat yang bertempat tinggal dalam desa tersebut

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Thomas (2013) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah atau publik merupakan kebijakan yang diseleksi pemerintah untuk dijalankan atau tidak dijalankan. Ketika pemerintah menjalankan suatu kebijakan, tentu harus memiliki sebuah tujuan. Maka dari itu, dalam pengertian diatas dapat dimaknai bahwa kebijakan publik adalah hasil dari ketetapan melalui musyawarah yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Kelembagaan Desa

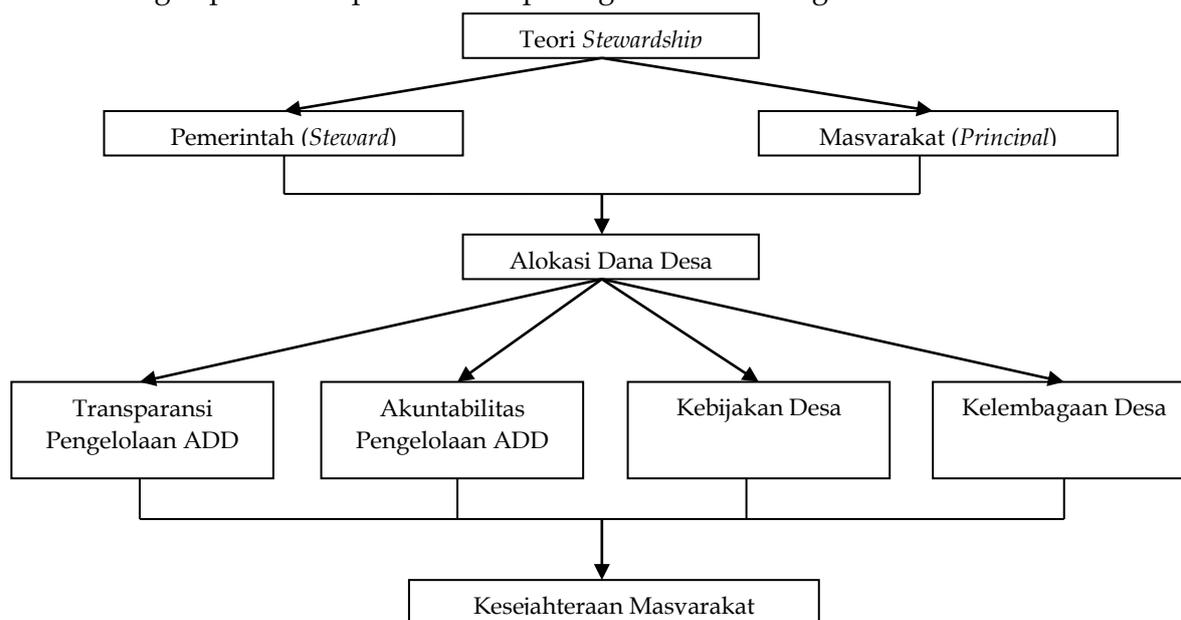
Lembaga kemasyarakatan merupakan wadah masyarakat untuk terlibat dan menyalurkan harapan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan desa dimana masyarakat sebagai tumpuannya (Sandhi, 2015). Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa kelembagaan desa yaitu aparat desa yang terdiri atas badan permusyawaratan desa dan diartikan sebagai sebuah organisasi yang dibentuk untuk menjadi perwakilan dari semua penduduk desa atas lingkungan desa yang telah ditetapkan. Kelembagaan desa memiliki peranan yang cukup penting, dimana lembaga yang ada pada suatu desa menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi atau ide-ide cemerlang untuk memajukan sebuah desanya.

Kesejahteraan Masyarakat

Menurut bahasa, kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, dan kemakmuran (kelimpahan). Nurohman *et al.* (2019) berpendapat bahwa kesejahteraan merupakan pelayanan sosial yang telah dirancang melalui sistem yang terorganisir dari sebuah organisasi untuk membantu perorangan atau kelompok untuk mencapai barometer hidup dan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah sebuah kondisi tercukupinya kebutuhan sosial, material, dan spiritual yang didukung dengan rasa kedamaian dan keselamatan lahir dan batin yang meningkat untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya sampai dikatakan hidup yang layak dan dapat berkembang menjadi lebih baik.

Rerangka Pemikiran

Rerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Transparansi adalah keterbukaan atas pemberian informasi yang dimiliki pemerintah desa mengenai informasi keuangan maupun kebijakan-kebijakan desa yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat ataupun semua yang berwenang dan membutuhkan informasi tersebut. Sari (2018) menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh masyarakat sangat berperan penting, pasalnya dengan adanya transparansi dapat membangun rasa percaya masyarakat atas tugas yang dikerjakan oleh pemerintah desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurniawan (2019) menyatakan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD) memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi pengelolaan keuangan yang secara terbuka diumumkan oleh pemerintah desa melalui papan informasi yang ada di balai desa.

H₁: Transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh setiap organisasi termasuk pemerintah daerah dalam melaksanakan kinerjanya. Kinerja yang dimaksud adalah semua bentuk tugas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pihak yang berwenang lainnya seperti pemerintah pusat. Dalam penelitian Kuswanti (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Ardelia (2022) akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa memberikan informasi keuangan secara menyeluruh melalui laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dapat dipertanggungjawabkan.

H₂: Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan desa adalah dasar hukum berskala kecil yang dibuat oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mengatur segala tindakan yang ada di desa. Kebijakan desa dibuat untuk ditaati dan dijalankan demi mencapai tujuan bersama yakni kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian Emylia (2019) disebutkan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan desa dibuat berdasarkan permasalahan yang tengah dihadapi oleh desa yang bertujuan untuk melakukan peningkatan sarana prasarana serta menanggulangi kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Menurut Dewi (2020) menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa, dimana kebijakan desa yang dibuat untuk dijadikan peraturan desa dapat mewujudkan pembangunan desa hingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

H₃: Kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kelembagaan desa merupakan wadah yang memiliki tugas dan fungsi tertentu dalam membantu pemerintah desa mewujudkan tujuan mensejahterakan masyarakat. Emylia (2019) menyatakan bahwa kelembagaan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan

masyarakat. Adanya kelembagaan desa ini memberikan kemudahan untuk pengadaan kegiatan masyarakat dimana masyarakat juga berpartisipasi langsung dalam program yang telah dibuat dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Anwar (2020) menyatakan bahwa kelembagaan desa berpengaruh 29 terhadap kesejahteraan masyarakat.

H₄: Kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan karakteristik masalahnya penelitian ini termasuk dalam penelitian kasual komparatif (*casual-comparative research*), penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab-akibat antara dua variabel atau lebih yang saling berhubungan.

Menurut Sugiyono (2016:136) populasi adalah subjek atau objek yang berada dalam suatu wilayah generalisasi yang memiliki jumlah dan karakter tertentu yang dipelajari peneliti untuk ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yang berada di lingkungan pemerintahan desa yang bertempat tinggal di Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2016:139). Sampel penelitian yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bulurejo yang memenuhi kriteria sebagai responden. Adapun kriteria yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: Penduduk atau masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, Penduduk yang memiliki rentang usia produktif atau masyarakat di Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang berusia antara 20 tahun sampai dengan 64 tahun. Berdasarkan perhitungan tersebut maka ditemukan jumlah populasi dari penelitian ini sebesar 2.545 individu. Dalam penelitian ini digunakan *error tolerance* sebesar 10% atau 0,1 berdasarkan perhitungan rumus slovin, maka dihasilkan sampel $n = 2.545 / (1 + (2.545 \times 0,1^2))$ dihasilkan $n = 96$ individu.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang telah dipilih oleh peneliti dan wajib dijawab oleh responden yang diajukan secara langsung kepada masyarakat Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Jawaban responden adalah hasil dari pemilihan alternatif yang mengacu pada *skala likert* yang sudah ditentukan. Data sekunder merupakan data berupa bukti, catatan, dan laporan historis yang sudah disusun dan diarsipkan oleh pemerintah desa yang telah dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini adalah berupa dokumen yaitu laporan penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), laporan keuangan tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta laporan realisasi anggaran.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas (*independen*) dan variabel terikat (*dependen*). Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel antara lain transparansi, akuntabilitas pengelolaan

alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa. Sedangkan variabel yang dipengaruhi atau variabel terikatnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Definisi operasional variabel merupakan aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana cara variabel diukur dengan menyatakannya secara ringkas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi adalah salah satu hal mendasar bagi terwujudnya proses pemerintahan yang baik. Keterbukaan pemerintah atas informasi termasuk informasi keuangan merupakan bentuk perwujudan dari pemenuhan hak dan 36 kewajiban yang harus diterima oleh masyarakat. Novitasari (2019) indikator yang diperlukan dalam mengukur transparansi pengelolaan alokasi dana desa diantaranya adalah: Komunikasi khalayak umum (publik) oleh pemerintah, Hak masyarakat atas informasi.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan desa secara rinci mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pelaporan yang dapat diumumkan pada masyarakat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Novitasari (2019) indikator yang diperlukan dalam mengukur akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa diantaranya adalah: Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan, Tanggung Jawab.

Kebijakan Desa

Kebijakan desa merupakan sebuah aturan yang menjadi acuan bagi pemerintah desa maupun masyarakat dalam menjalankan atau melakukan sebuah program dengan tujuan tertentu. Efektif atau tidaknya sebuah kebijakan dapat dilihat dari tercapainya tujuan yang sesuai dengan target atau sasarannya. Menurut Kuswanti (2020) indikator yang diperlukan untuk mengukur kebijakan desa sebagai berikut: Akses, Bias, Ketepatan layanan, Akuntabilitas, Kesesuaian program dengan kebutuhan.

Kelembagaan Desa

Kelembagaan desa merupakan sebuah organisasi yang terdapat dalam suatu desa yang menjadi wadah dengan memiliki tugas dan fungsinya masing masing untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan adanya lembaga desa ini dapat membantu tugas dan fungsi pemerintah desa, khususnya dapat mempermudah dalam menampung aspirasi masyarakat desa. Menurut Emylia (2019) indikator untuk mengukur kelembagaan desa adalah kelembagaan desa antara lain: Kesesuaian tugas dan fungsi, Wadah masyarakat, Partisipasi masyarakat.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan sosial, material, dan spiritual, serta rasa aman dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat hidup dan berkembang secara layak, disertai dengan peningkatan taraf hidup yang signifikan. Kuswanti (2020) menyatakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat antara lain: Tingkat kesehatan, Tingkat pendidikan, Ekonomi.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018:19) Pengujian statistik deskriptif adalah metode dengan memberikan deskripsi atau gambaran mengenai suatu data yang dapat dilihat dari rata-rata, standar deviasi, maksimal, minimal. Dalam tabel statistik deskriptif yang ada dalam SPSS

menggambarkan karakteristik responden yang berhubungan dengan pernyataan dan pertanyaan kuesioner mengenai variabel yang diteliti antara lain variabel transparansi pengelolaan alokasi dana desa, akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa, serta kesejahteraan masyarakat.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Ghozali (2018:51) menyatakan bahwa uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dapat dikatakan valid jika indikator tersebut r hitung $>$ r tabel dan bernilai positif. Sebaliknya, dikatakan tidak valid jika indikator tersebut r hitung $<$ dari r tabel dan bernilai negatif.

Menurut Ghozali (2018:45) dapat dikatakan reliabel ketika responden menjawab kuesioner terhadap pernyataannya adalah konsisten dari waktu ke waktu. Instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,6 dan begitu pula sebaliknya, instrumen penelitian dikatakan tidak reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $<$ 0,6.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu mempunyai distribusi normal (Ghozali, 40 2018:161). Karena model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal atau hampir mendekati normal. Dalam uji normalitas ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov* (KS) dan uji Normal P-P Plot. Untuk membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal, pada uji *Kolmogorov-Smirnov* (KS) nilai residual (pengganggu) terstandarisasi berdistribusi normal K -hitung $<$ K -tabel atau nilai sig. $>$ alpha. Dalam distribusi normal membentuk garis lurus, sedangkan pada plotting data residual akan diperbandingkan dengan garis diagonal, jika data residual normal maka garis diagonal akan mengikuti.

Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2018:107) uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Sebab model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung korelasi antar variabel independennya. Multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai tolerance yang rendah = nilai VIF yang tinggi. Menunjukkan tidak adanya multikolonieritas dalam pengujian ini bisa dilihat nilai cutoff yang umum digunakan yaitu nilai tolerance \geq 0,1 atau sama halnya dengan nilai VIF \leq 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji adanya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Jika variance dari residual disetiap pengamatan tetap, maka bukan dikatakan heteroskedastisitas melainkan disebut homoskedastisitas (Ghozali, 2018:137). Karena model regresi yang baik adalah yang tidak adanya atau terjadi heteroskedastisitas. Mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat ada atau tidaknya bentuk tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residualnya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui arah hubungan apakah variabel bebas (independen) berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Berikut merupakan model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini:

$$KM = \alpha + \beta_1TPADD + \beta_2APADD + \beta_3KBD + \beta_4KLD + e$$

Keterangan:

KM	: Kesejahteraan Masyarakat
α	: Konstanta
$\beta_1, 2, 3, 4$: Koefisien Regresi Variabel Independen
TPADD	: Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
APADD	: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
KBD	: Kebijakan Desa KLD : Kelembagaan Desa
e	: <i>Error Term</i>

Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018:97) koefisien determinasi mempunyai tujuan untuk mengukur sejauh apa kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0-1, hal tersebut dapat diterangkan sebagai berikut: a) Jika nilai R^2 yang diperoleh kecil atau mendekati 0 maka kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependennya amat terbatas atau lemah. b) Jika nilai R^2 yang diperoleh tinggi atau mendekati 1 maka kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependennya kuat atau dapat dikatakan bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Goodness of Fit (Uji F)

Uji F bertujuan untuk melihat apakah variabel dependen (Y) berhubungan linear terhadap variabel independen (X1, X2, X3, dan X4), hal tersebut dinamakan dengan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diteliti maupun diperkirakan (Ghozali, 2018:98). Untuk menguji kelayakan model regresi, apakah model regresi tersebut layak diuji lebih lanjut atau tidak dapat dilihat keterangannya sebagai berikut: a) Variabel independen (X) layak untuk menjelaskan variabel dependen (Y) ditunjukkan dengan nilai sign uji $F \leq 0,05$. b) Variabel independen (X) tidak layak untuk menjelaskan variabel dependen (Y) ditunjukkan dengan nilai sign uji $F \geq 0,05$.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara tunggal dalam memberikan keterangan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, dimana nilai t untuk tingkat signifikansinya adalah 0,05. Adapun pengujian hipotesisnya sebagai berikut: a) Jika nilai sig $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. b) Jika nilai sig $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN**Deskripsi Hasil Penelitian**

Pada penelitian yang dilakukan di Desa Bulurejo, diperoleh data primer dengan menyebar kuesioner kepada masyarakat sesuai dengan perhitungan yang sudah ditentukan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 96 jiwa atau masyarakat. Adapun pembagian responden pada penelitian ini antara lain:

Tabel 1
Responden Penyebaran Kuisisioner

No	Responden	Jumlah
1	Kepala Desa dan Perangkat Desa	14 orang
2	Pengurus Rukun Warga (RW)	6 orang
3	Pengurus Rukun Tetangga (RT)	17 orang
4	Pengurus PKK dan Anggota	14 orang
5	Pengurus Koperasi dan Anggota	11 orang
6	Pengurus Karang Taruna dan Anggota	12 orang
7	Pengurus Remaja Masjid dan Anggota	8 orang
8	Masyarakat Umum	14 orang
Total		96 orang

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Analisis Deskriptif

Kuesioner dalam penelitian ini menunjukkan adanya pernyataan - pernyataan yang berbentuk skala likert yang digunakan untuk mengukur data kuantitatif dari responden. Adapun data kuesioner yang berisi pernyataan berhubungan dengan semua variabel (independen dan dependen). Total pernyataan berjumlah 25 dengan pembagian 4 pernyataan untuk transparansi pengelolaan alokasi dana desa, 6 pernyataan untuk akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, 5 pertanyaan untuk kebijakan desa, 3 pertanyaan untuk kelembagaan desa, serta 7 pernyataan untuk kesejahteraan masyarakat. Dari masing - masing pernyataan tiap variabel, kemudian dijumlah dan menghasilkan pengujian statistik deskriptif variabel sebagai berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TPADD	96	12	20	16.61	1.682
APADD	96	21	30	24.76	2.004
KBD	96	17	24	20.60	1.573
KLD	96	11	15	12.99	1.183
KM	96	24	35	28.72	2.040
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel statistik deskriptif variabel penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Variabel Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (TPADD) menunjukkan hasil dengan nilai minimal sebesar 12, nilai maksimal sebesar 20, nilai rata - rata sebesar 16,61, dan nilai standar deviasi sebesar 1,682. (2) Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (APADD) menunjukkan hasil dengan nilai minimal sebesar 21, nilai maksimal sebesar 30, nilai rata - rata sebesar 24,76, dan nilai standar deviasi sebesar 2,004. (3) Variabel Kebijakan Desa (KBD) menunjukkan hasil dengan nilai minimal sebesar 17, nilai maksimal sebesar 24, nilai rata - rata sebesar 20,60, dan nilai standar deviasi sebesar 1,573. (4) Variabel Kelembagaan Desa (KLD) menunjukkan hasil dengan nilai minimal sebesar 11, nilai maksimal sebesar 15, nilai rata - rata sebesar 12,99, dan nilai standar deviasi

sebesar 1,183. (5) Variabel Kesejahteraan Masyarakat (KM) menunjukkan hasil dengan nilai minimal 24, nilai maksimal sebesar 35, nilai rata - rata sebesar 28,72, dan nilai standar deviasi sebesar 2,040.

Uji Validitas

Tujuan dari uji validitas adalah untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2018:51). Ketentuan yang digunakan yakni jika nilai r hitung > 0,2006 dan bernilai positif dikatakan valid. Sedangkan jika nilai r hitung < 0,2006 dan bernilai negatif, maka indikator tersebut dikatakan tidak valid.

Tabel 3
Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	N	Koefisien Korelasi	Keterangan
Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	TPADD1	96	0,362	Valid
	TPADD2	96	0,384	Valid
	TPADD3	96	0,390	Valid
	TPADD4	96	0,528	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	APADD1	96	0,541	Valid
	APADD2	96	0,489	Valid
	APADD3	96	0,604	Valid
	APADD4	96	0,520	Valid
	APADD5	96	0,484	Valid
	APADD6	96	0,553	Valid
Kebijakan Desa	KBD1	96	0,432	Valid
	KBD2	96	0,455	Valid
	KBD3	96	0,397	Valid
	KBD4	96	0,382	Valid
	KBD5	96	0,427	Valid
Kelembagaan Desa	KLD1	96	0,483	Valid
	KLD2	96	0,528	Valid
	KLD3	96	0,440	Valid
Kesejahteraan Masyarakat	KM1	96	0,573	Valid
	KM2	96	0,450	Valid
	KM3	96	0,453	Valid
	KM4	96	0,538	Valid
	KM5	96	0,398	Valid
	KM6	96	0,439	Valid
	KM7	96	0,340	Valid

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji validitas diatas, bahwa nilai pada setiap pernyataan memiliki nilai r hitung > 0,2006, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh pernyataan yang ada di dalam variabel KM dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk menguji jawaban dari responden apakah dapat dikatakan reliabel atau tidak. Ketentuan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan

menggunakan uji *Alpha Cronbach*, dimana dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6, sebaliknya dikatakan tidak reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,6.

Tabel 4
Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items	Keterangan
TPADD	0,624	4	Reliabel
APADD	0,773	6	Reliabel
KBD	0,663	5	Reliabel
KLD	0,663	3	Reliabel
KM	0,735	7	Reliabel

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas diatas, setiap variabel menunjukkan nilai > 0,6 yang berarti bahwa seluruh variabel merupakan instrumen penelitian yang dikatakan reliabel.

Uji Normalitas

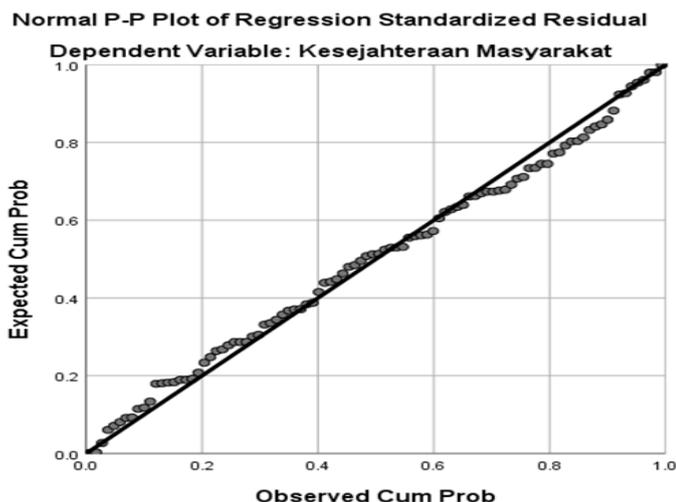
Ghozali (2018:161) tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas yang pertama dapat menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* (KS) dan uji yang kedua dapat menggunakan uji P-P Plot. Untuk Uji normalitas yang pertama dilakukan dengan cara uji *Kolmogorov-Smirnov* (KS). Dimana residual dinyatakan normal jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* > 0,05.

Tabel 5
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,64585524
Most Extreme Differences	Absolute	0,059
	Positive	0,053
	Negative	-0,059
Test Statistic		0,059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,2 yang berarti nilai signifikansi > 0,05. Hal tersebut dapat menyimpulkan bahwa residual memiliki distribusi normal. Setelah menggunakan cara yang pertama yakni *Kolmogorov-Smirnov* (KS), uji normalitas yang kedua diuji dengan uji normal P-P Plot. Adapun ketentuan dalam uji normal P-P Plot distribusi normal membentuk garis lurus, sedangkan pada plotting data residual akan diperbandingkan dengan garis diagonal, jika data residual normal maka garis diagonal akan mengikuti.



Gambar 2
 Hasil Uji Normalitas
 Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan gambar hasil uji normalitas, menunjukkan bahwa plotting data mengikuti garis diagonal yang membentuk garis lurus. Hal tersebut menyimpulkan data residual berdistribusi normal dan dapat dilakukan uji selanjutnya dalam penelitian.

Uji Multikolonieritas

Tujuan dari uji multikolonieritas adalah untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dalam suatu model regresi (Ghozali, 2018:107). Ketentuan uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Menunjukkan adanya tidak adanya multikolonieritas jika nilai tolerance $\geq 0,1$ atau sama halnya dengan nilai $VIF \leq 10$.

Tabel 6
 Uji Multikolonieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (TPADD)	0,698	1,432	Tidak Berlaku Multikolonieritas
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (APADD)	0,679	1,472	Tidak Berlaku Multikolonieritas
Kebijakan Desa (KBD)	0,908	1,101	Tidak Berlaku Multikolonieritas
Kelembagaan Desa (KLD)	0,934	1,071	Tidak Berlaku Multikolonieritas

a. Variabel Dependen: Kesejahteraan Masyarakat

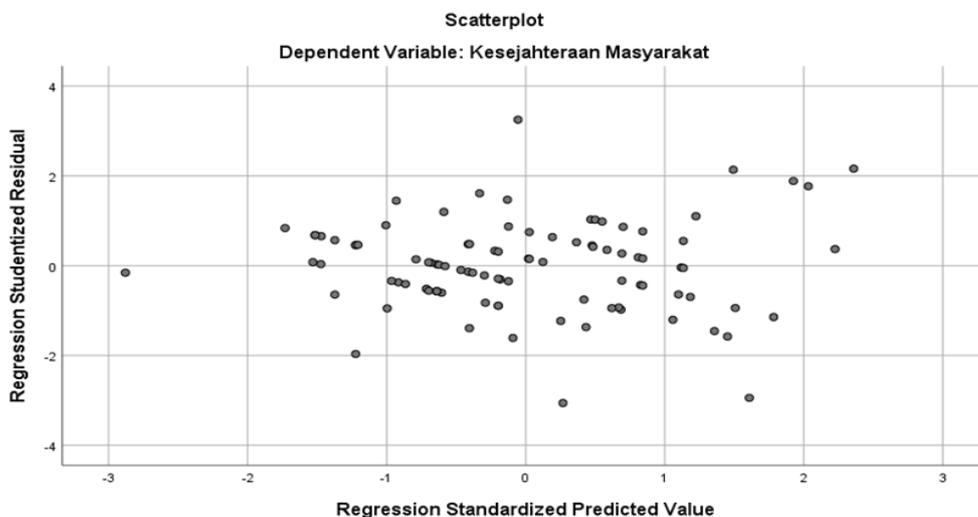
Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas, menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai tolerance $\geq 0,1$ dan nilai $VIF \leq 10$. Dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi antar variabel bebas tidak ditemukan adanya korelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi adanya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pada

penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan pendekatan grafik (*Scatterplot*). Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan metode pendekatan grafik (*Scatterplot*):



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*)
Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan gambar hasil uji heteroskedastisitas, menunjukkan bahwa titik – titik membentuk pola abstrak dan menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak adanya masalah heteroskedastisitas dan memenuhi syarat uji asumsi klasik.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan analisis regresi linear berganda adalah untuk mengetahui arah hubungan apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Berikut merupakan hasil perhitungan uji regresi linear berganda:

Tabel 7
Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	10,370	3,078		3,369	0,001
	TPADD	-0,352	0,123	-0,290	-2,866	0,005
	APADD	0,442	0,104	0,434	4,232	0,000
	KBD	0,371	0,115	0,286	3,222	0,002
	KLD	0,432	0,151	0,250	2,859	0,005

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (KM)

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel uji regresi linear berganda, maka dihasilkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$KM = 10,370 - 0,352TPADD + 0,442APADD + 0,371KBD + 0,432KLD + e$$

Hasil model persamaan regresi dan tabel antara variabel independen terhadap variabel dependen dapat diinterpretasikan sebagai berikut: (1) Nilai variabel transparansi pengelolaan alokasi dana desa menghasilkan koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,352 yang berarti bahwa variabel transparansi pengelolaan alokasi dana desa memiliki hubungan yang tidak searah atau pengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. (2) Nilai variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menghasilkan koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,442 yang berarti bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa memiliki hubungan searah atau pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. (3) Nilai variabel kebijakan desa menghasilkan koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,371 yang berarti bahwa variabel kebijakan desa memiliki hubungan searah atau pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. (4) Nilai variabel kelembagaan desa menghasilkan koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,432 yang berarti bahwa variabel kelembagaan desa memiliki hubungan searah atau pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tujuan uji koefisien determinasi adalah untuk mengukur sejauh apa kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Tabel dibawah ini merupakan hasil uji empat variabel bebas terhadap variabel terikat:

Tabel 8
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.591 ^a	0,349	0,321	1,682

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji determinasi, menunjukkan besarnya koefisien determinasi yang dapat dilihat pada nilai R Square sebesar 0,349 yang berarti bahwa persentase sebesar 34,9% variabel kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan dengan variabel kelembagaan desa, kebijakan desa, transparansi pengelolaan alokasi dana desa, dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan persentase 65,1% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tujuan uji F adalah untuk menguji apakah variabel terikat (dependen) berhubungan linear terhadap variabel bebas (independen). Untuk menguji kelayakan suatu model regresi, memiliki ketentuan jika nilai sign uji F < 0,05 maka variabel independen layak untuk menjelaskan variabel dependen. Begitu pula sebaliknya, jika nilai sign uji F > 0,05 maka variabel independen tidak layak untuk menjelaskan variabel dependen. Berikut adalah hasil uji kelayakan model (uji F):

Tabel 9
Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	138,067	4	34,517	12,206	.000 ^b
	Residual	257,340	91	2,828		
Total		395,406	95			

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji F, menunjukkan nilai F sebesar 12.206 dengan sign sebesar 0,000 dimana nilai tersebut $< 0,05$ bahwa dapat disimpulkan model regresi dapat digunakan untuk penelitian karena seluruh variabel independen layak menjelaskan variabel dependen.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Tujuan uji t adalah untuk menguji seberapa jauh variabel terikat (independen) secara individual dalam memberikan keterangan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Dengan nilai t untuk tingkat signifikansinya sebesar 0,05 maka pengujian hipotesisnya dengan ketentuan jika nilai sig $< 0,05$ maka hipotesis diterima, sedangkan jika nilai sig $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Berikut merupakan hasil dari uji hipotesis:

Tabel 10
Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		
		B	t	Sig.
1	(Constant)	10,370	3,369	0,001
	TPADD	-0,352	-2,866	0,005
	APADD	0,442	4,232	0,000
	KBD	0,371	3,222	0,002
	KLD	0,432	2,859	0,005

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (KM)

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Variabel Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (TPADD) menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 2,866 dengan signifikansi sebesar 0,005 yang berarti nilai sig $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. (2) Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (APADD) menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 4,232 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang berarti nilai sig $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. (3) Variabel Kebijakan Desa (KBD) menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 3,222 dengan signifikansi sebesar 0,002 yang berarti nilai sig $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan desa signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. (4) Variabel Kelembagaan Desa (KLD) menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 2,859 dengan signifikansi sebesar 0,005 yang berarti nilai sig $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan desa signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan sebelumnya, variabel transparansi pengelolaan alokasi dana desa menghasilkan nilai t negatif sebesar 2,866 dan nilai sig sebesar $0,005 \leq 0,05$ maka dapat disimpulkan untuk transparansi pengelolaan alokasi dana desa signifikan tetapi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa variabel transparansi pengelolaan alokasi dana desa bertentangan dengan hipotesis yang sudah diajukan, maka untuk H_1 ditolak. Kesimpulan tersebut didukung atas jawaban dari masyarakat mengenai transparansi pengelolaan alokasi dana desa bahwa

masyarakat sudah dilibatkan dalam musyawarah untuk merencanakan penggunaan alokasi dana desa, tetapi masyarakat masih merasa sulit untuk mengakses keterbukaan pemerintah desa mengenai laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Merasa sulit yang dimaksud oleh masyarakat adalah pemerintah Desa Bulurejo hanya melakukan salah satu bentuk transparansi yaitu dengan membuat banner yang berisi APBDesa tahun 2022 yang letaknya ada di dalam halaman kantor desa, bukan di depan kantor desa. Hal tersebut juga berarti kurang terlihatnya transparansi yang sudah dibuat pemerintah desa Bulurejo oleh masyarakat. Selain karena hanya melakukan salah satu bentuk transparansi saja, keterbukaan pemerintah desa Bulurejo masih kurang luas. Karena di zaman yang sudah semakin maju dan teknologi yang semakin berkembang, seharusnya pemerintah Desa Bulurejo melakukan transparansi lewat web resmi yang sudah dimiliki. Dengan adanya transparansi atau keterbukaan yang mencakup laporan penggunaan alokasi dana desa lewat web atau jaringan internet akan menjadikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melihat dan mengawasi kinerja dari pemerintah desa dan secara tidak langsung hak masyarakat untuk mengetahui keterbukaan pemerintah desa juga akan terpenuhi.

Dengan melihat kondisi tersebut, memiliki arti bahwa masyarakat masih belum mendapatkan haknya untuk mengetahui prosedur anggaran secara luas sebagai bentuk transparansi yang didalamnya mencakup aspirasi masyarakat. Seharusnya masyarakat berhak mengetahui transparansi laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan akses yang lebih mudah agar dapat memberikan pengawasan atas pengelolaan anggaran yang sudah diterima oleh pemerintah desa. Artinya dalam hal ini pemerintah desa masih belum menerapkan *Stewardship Theory* yang baik dan meluas karena hak masyarakat selaku principal masih belum dipenuhi oleh *steward* yang dimana adalah pemerintah desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari (2018), Novitasari (2019), Kuswanti (2020), dan Parianto (2022) yang mengungkapkan bahwa pemerintah desa memang sudah mengadakan musyawarah mengenai pengelolaan alokasi dana desa, tetapi masyarakat masih belum mendapat akses atas transparansi pemerintah desa dalam menyajikan keterbukaan laporan penggunaan alokasi dana desa bagi masyarakat desa.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan sebelumnya, variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menghasilkan nilai t positif sebesar 4,232 dan nilai sig sebesar $0,000 \leq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa signifikan dan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa hipotesisnya dapat diterima. Kesimpulan tersebut didukung dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sesuai dengan aturan sehingga masyarakat desa juga merasakan imbas yang baik.

Selain itu, masyarakat juga menjelaskan bahwa pemerintah desa sudah menunjukkan tanggung jawabnya untuk melaksanakan atau menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dengan sewajarnya. Hal tersebut juga mendapat respon yang baik dari masyarakat, karena masyarakat merasa puas atas kinerja pemerintah desa. Dalam hal ini artinya pemerintah desa sudah menerapkan *Stewardship Theory* dengan baik dimana pemerintah desa selaku *steward* sebagai pemberi layanan yang bertanggungjawab dalam mengendalikan aset yang dimiliki. Selain itu, dalam *Stewardship Theory* juga menjelaskan hubungan yang kuat terjalin melalui kepuasan dan keberhasilan organisasi.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019), Anwar (2020), Ardelia (2022) yang berpendapat bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, karena dengan

mempertanggungjawabkan kinerja serta laporan keuangan kepada masyarakat adalah tujuan utama pemerintah desa. Apabila akuntabilitas pengelolaan dana desa terpenuhi maka program yang dijalankan pemerintah desa juga akan berjalan dengan lancar, dan otomatis kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Pengaruh Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan sebelumnya, variabel kebijakan desa menunjukkan hasil nilai t positif sebesar 3,222 dan nilai sig sebesar $0,002 \leq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan desa signifikan dan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa variabel kebijakan desa hipotesisnya dapat diterima.

Adanya pengaruh positif dari kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat berarti semakin baik kebijakan desa yang diterapkan maka akan semakin meningkat kesejahteraan masyarakat. Pasalnya suatu kebijakan dibuat untuk bisa memberikan tujuan yang jelas atas semua kegiatan atau program yang ada di desa. Terciptanya kebijakan desa berdasar dari adanya permasalahan yang ada dalam suatu desa untuk dapat mengurangi atau mengatasi masalah tersebut. Ketepatan layanan dan kesesuaian program yang diatur dalam kebijakan desa akan memberikan dampak yang sangat baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan kebijakan desa mampu dilaksanakan secara efektif terutama yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat seperti kesehatan, perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya supaya kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Seperti dalam konsep *Stewardship Theory*, pemerintah desa (*steward*) akan berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya, itu sebabnya perilaku *steward* harus bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan organisasinya.

Hasil penelitian ini sependapat dengan Emylia (2019), Amalia (2022) mengatakan bahwa meningkatnya kebijakan desa yang dibuat oleh pemerintah desa mengenai pembangunan ekonomi maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan sebelumnya, variabel kelembagaan desa menunjukkan hasil nilai t positif sebesar 2,859 dan nilai sig sebesar $0,005 \leq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa kelembagaan desa signifikan dan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa variabel kelembagaan desa hipotesisnya dapat diterima.

Kesimpulan tersebut didukung dengan jawaban kuesioner yang diberikan kepada masyarakat, masyarakat menjelaskan bahwa kelembagaan desa sudah berjalan sesuai dengan fungsinya, selain itu kelembagaan desa yang ada juga dapat menampung aspirasi masyarakat dimana hal tersebut mampu memberikan masukan yang positif untuk membantu program - program sedang dijalankan oleh pemerintah desa. Adapun kelembagaan desa yang ada di Desa Bulurejo diantaranya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perlindungan Masyarakat (Linmas), Karang Taruna Bina Remaja (Kartar), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan lain - lain. Dengan adanya kelembagaan desa tersebut mampu dijadikan jembatan untuk menjalin hubungan yang baik sesuai *Stewardship Theory* dimana para *steward* atau pemerintah desa memberikan tanggung jawab pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan masyarakat selaku *principal* juga memberikan dukungan motivasi untuk pemerintah desa melakukan pekerjaannya.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Yupita dan Juita (2020) yang menyatakan bahwa lembaga masyarakat menjadi tempat masyarakat untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang melibatkan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilakukan di Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik pada tahun 2022. Berdasarkan hasil dari pengujian dan analisis data menggunakan regresi linear berganda, maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan kurangnya keterbukaan pemerintah Desa Bulurejo secara luas dalam pengelolaan anggaran alokasi dana desa yang berakibat kurang puasnya masyarakat terhadap pemerintah desa karena tidak mendapatkan akses yang mudah untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran alokasi dana desa meskipun sudah mengadakan musyawarah. Tidak mendapatkan akses yang mudah ini karena pemerintah Desa Bulurejo hanya melakukan salah satu bentuk transparansi saja, yaitu dengan membuat laporan dalam bentuk banner yang letaknya di dalam halaman kantor desa, bukan di depan kantor desa. Hal tersebut membuat kurang terlihatnya transparansi yang dilakukan pemerintah Desa Bulurejo. Selain itu, pemerintah Desa Bulurejo tidak melakukan transparansi dalam bentuk yang lain, seperti meng-upload di situs web resmi Desa Bulurejo yang dimana hal tersebut adalah sebuah terobosan yang cukup bagus untuk masyarakat mengakses informasi dengan mudah. (2) Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa mengenai penggunaan alokasi dana desa yang digunakan dengan semestinya dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, laporan yang dibuat oleh pemerintah Desa Bulurejo juga sudah disajikan secara rinci setiap aliran dana yang masuk dan aliran dana keluar yang digunakan dalam berbagai kegiatan pemerintah desa antara lain pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. (3) Kebijakan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bulurejo Ketepatan layanan dan kesesuaian program yang diatur dalam kebijakan desa adalah suatu hal utama yang akan memberikan dampak sangat baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. (4) Kelembagaan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan bahwa lembaga masyarakat yang ada di Desa Bulurejo sudah berjalan sesuai dengan fungsinya, dan yang paling penting dapat menampung aspirasi masyarakat. Dengan adanya kelembagaan desa tersebut mampu dijadikan jembatan untuk menjalin hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat. Pemerintah desa memberikan tanggung jawab pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan masyarakat memberikan dukungan motivasi untuk pemerintah desa melakukan pekerjaannya.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diselesaikan dan kesimpulan yang sudah didapat, maka peneliti mempunyai saran untuk kesempurnaan penelitian kali ini dan dapat dijadikan evaluasi untuk penelitian selanjutnya. Adapun saran dari peneliti sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah Desa Bulurejo diharapkan mampu memberikan keterbukaan mengenai laporan pertanggung jawaban penggunaan alokasi dana desa kepada masyarakat secara lebih luas, khususnya masyarakat di Desa Bulurejo. Selain dengan menampilkan laporan dalam bentuk banner yang ada di kantor kepala desa, seharusnya laporan tersebut juga di-upload di website resmi Desa Bulurejo, karena itu akan mudah diakses dan dijangkau oleh

masyarakat. (2) Bagi masyarakat diharapkan mampu dan lebih peduli dalam mengawasi penggunaan anggaran atau dana desa yang ada di Desa Bulurejo. Selain itu, masyarakat juga lebih aktif lagi dalam memberikan masukan dan saran untuk pemerintah desa jikalau ada yang merasa kurang puas, karena dengan adanya komunikasi yang baik antara masyarakat dan perangkat desa akan menciptakan lingkungan desa yang sehat dan nyaman. (3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu memberikan variasi mengenai variabel lain yang akan digunakan untuk penelitian yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat seperti tingkat pendidikan, partisipasi masyarakat, pemahaman teknologi atau variabel lain agar mendapatkan temuan penelitian yang baru. Selain menambah variabel baru, untuk mendapat jawaban yang lebih akurat dapat dilakukan metode wawancara secara langsung kepada masyarakat yang menjadi subjek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, K. F. 2022. Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Kepemimpinan, Transparansi ADD, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi). *Skripsi*. Universitas Islam Malang. Malang.
- Anwar, M. R. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pati Kabupaten Pati). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Ardelia, S. N. 2022. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Serta Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Empiris Pada Desa Sumorame). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Dewi, F. G. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Donaldson, L. dan J.H. Davis. 1989. CEO Governance and Shareholder Returns: Agency Theory or Stewardship Theory. *Australian Journal of Management*.
- Emylia, L. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kholmi, M. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Jurnal of Innovation in Business and Economics (JIBE)* 7(2): 143-152.
- Kurniawan, T. H. 2019. Bahwa Penggunaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Kuswanti, A. P. 2020. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Novitasari. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Nurohman, Y.A., R.S. Qurniawati, dan F, Hasyim. 2019. Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. *Jurnal Magisma* 7(1): 35-43.

- Parianto, I. 2022. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu). *Skripsi*. Universitas Tribhuwana Tungadewi. Malang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2093. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 30 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
- Renyowijoyo, M. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sandhi, R. H. 2015. Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Yogyakarta. Yogyakarta.
- Sari, A. N. 2018. Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Sugista, R. A. 2017. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Skripsi*. Universitas Lampung. Lampung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Alfabeta. Bandung.
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Subawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanatidung. *Jurnal Pemerintahan Integratif*. 51-64.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 *Kesejahteraan Sosial*. 16 Januari 2009. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Yupita, L. dan V. Juita. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 11(1): 56-64.